

TAJUK RENCANA

Kerukunan untuk Kemanusiaan

KUNJUNGAN Paus Fransiskus di Indonesia, Kamis (5/9) di Jakarta, disambut hangat Presiden RI Joko Widodo, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran pemimpin umat Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan itu juga disambut meriah sekitar 87.000 umat Katolik, yang kemudian mengikuti ibadah misa di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Para jemaat yang hadir menyambut Paus Fransiskus dengan yel-yel seperti *Viva il Papa, Viva Papa Francisco*. Hidup Paus, Hidup Paus Fransiskus. Juga dilantunkan nyanyian lagu Kristus Jaya dan Ave Maria. Perwakilan umat dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga ikut menyampaikan doa secara bergiliran.

Sementara itu, dalam kunjungan di Masjid Istiqlal Jakarta juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024, yang ditandatangani bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Inti Deklarasi Istiqlal 2024 adalah, Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan.

Deklarasi tersebut menyerukan agar nilai-nilai yang dianut tradisi agama terus ditingkatkan secara efektif untuk menghilangkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang sedang melanda dunia. Nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan kerusakan lingkungan.

Menurut Paus Fransiskus, para pemimpin agama harus bekerja sama dalam menanggapi berbagai krisis, mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat. Dialog antarumat beragama merupakan sarana yang efektif untuk menyelesaikan kon-

flik lokal, regional, internasional, terutama konflik yang dipicu penyalahgunaan agama.

Disebutkan, berbagai ritual agama dapat menumbuhkan rasa saling hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia. Perlu disadari pentingnya lingkungan hidup yang sehat, damai dan harmonis, serta menjadi hamba Allah dan pemelihara penciptaan yang sejati. Deklarasi Istiqlal juga berisi imbauan agar semua orang menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumberdaya yang dapat diwariskan kepada generasi masa depan.

Deklarasi Istiqlal 2024, yakni Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan, mestinya dapat dimaknai secara universal. Bahwa di dunia, termasuk Indonesia, perlu adanya antaranak bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai sosial, untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pesta demokrasi Pilkada 2024, mestinya para elit politik tidak hanya mengutamakan kontestasi untuk meraih kemenangan semata. Semua elit politik seharusnya tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, persatuan dan kesatuan.

Semoga di tahun politik 2024 ini tidak hanya ada kerukunan umat beragama untuk kemakmuran, tetapi juga kerukunan sesama anak bangsa untuk kesatuan dan persatuan Indonesia. Untuk itu perlu diwujudkan Pilkada 2024 yang jujur, adil, rukun, damai, sejuk, aman dan nyaman. □d

Menguji Netralitas ASN pada Pilkada 2024

M Abdul Karim Mustofa

SETIAP perhelatan pergantian kepemimpinan di Indonesia baik Pemilu maupun Pilkada selalu ada diskursus yang satu ini, yakni keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik mengarah pada pelanggaran netralitas yang didominasi dalam bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon baik melalui jalur *offline* maupun *online*. Satu hal yang patut diwaspadai terkait dengan netralitas ASN adalah Pilkada 2024.

ASN, Mungkinkah Netral

Petahana dan netralitas ASN seperti dua sisi mata uang, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Isu yang sering muncul di permukaan ialah kondisi di mana ASN dihadapkan pada *dual situation*, apakah mengikuti perintah atasan (baca:petahana) yang sekaligus sebagai Pejabat Pegawai Kepegawaian (PPK) atau memilih asas netralitas. Kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun walikota adalah jabatan politik yang karena kepemimpinannya berdasarkan proses politik, yaitu Pilkada. Sebagai pejabat politik, mereka mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, menggangg, dan memberhentikan ASN.

Keberadaan ASN yang demikian, akhirnya akan berhadapan dengan situasi yang sulit. Satu sisi, ASN harus menjaga profesionalitas dan asas netralitasnya mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2023 sebagai perubahan atas berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, sementara di sisi yang lain mereka mesti mementingkan karier dan kenaikan pangkat/jabatan. Dua situasi ini seringkali 'dimanfaatkan' oleh calon dari petahana dan/atau calon yang berasal dari mantan pejabat daerah di mana calon tersebut sama-sama mempunyai pengaruh dan kuasa kepada ASN yang pernah dipimpinya. Mereka memanfaatkan 'hak politik' ASN sebagai ladang politik atau politisasi ASN.

Kalau ditanya ASN dalam Pilkada 2024 bagaimana, netral atau tidak? maka pertama, narasi di atas bisa menjadi dasar pemikiran para pemangku kepentingan dalam mengawasi netralitas ASN yang kapan saja bisa terjadi, apalagi ini berkaitan dengan Pilkada tentu jauh akan lebih masif potensi pelanggaran. Kedua kita bisa melihat tabulasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 bah-



KR-JOKO SANTOSO

wa KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut, 197 ASN di antaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Tantangan Bawaslu Mengawasi

Bicara netralitas ASN, Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan penegakan hukum (*pro justitia*) guna menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 ini. Benar bahwa ASN sejatinya adalah sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh

pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa oknum ASN tidak sedikit pula yang mempergunakan integritasnya guna mendukung dan berpihak kepada paslon tertentu hingga pada akhirnya mengabdikan netralitasnya.

Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan pelanggaran netralitas ASN harus tegak lurus (*on the track*) dengan peraturan yang ada. Di luar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tentu harus juga memastikan dijalkannya peraturan lainnya termasuk PKPU, Perbawaslu, juga Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, di mana setiap ASN dilarang melakukan memasang spanduk/baliho/alat peraga bakal calon peserta pemilu, sosialisasi/kampanye media, menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon peserta pemilu, membuat *posting, comment, share, like, follow* dalam grup/akun pemenangan bakal calon peserta pemilu, memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses publik, dan ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu. □d

M Abdul Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Periode 2018-2023, kini aktif di lembaga Pemantau Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini@kr.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklan@kr23@yahoo.com, iklan@kr13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Kemenag dan Vatican Berjodoh

Aven Jaman

MODERASIberagama adalah istilah yang menjadi kata kunci dalam giat Kementerian Agama sejak dipimpin Yaquut Cholil Qoumas. Di tangannya, Kemenag dikondisikan sedemikian rupa hingga moderasi beragama menjadi primadona giat kementerian. Tema ini jadi sentral dengan porsi perhatian relatif lebih dibandingkan tema lainnya.

Moderasi beragama adalah upaya untuk menghormati penganut agama lain menghayati iman dan kepercayaan dengan leluasa tanpa teror dan intimidasi. Sementara untuk orientasi internal, moderasi beragama dimaksudkan agar masing-masing penganut agama tidak berlebihan dalam penghayatan keagamaannya.

Ikhtiar dan sikap seperti ini tidak bisa lahir begitu saja, terutama di wilayah tertentu yang komposisi penduduknya cenderung homogen dalam hal agama. Misalnya Aceh yang cenderung homogen menganut Islam. Lalu Flores yang cenderung homogen menganut Katolik. Baik Islam maupun Katolik, keduanya sama-sama agama yang resmi di mata negara. Artinya, menjadi warga negara Indonesia harusnya sadar bahwa tak hanya agama yang dianutnya saja yang diakui resmi, melainkan juga ada 5 agama lain di republik ini.

Bagaimana dengan Vatican? Vatican adalah sebuah negara kota. Secara geografis, Vatican berada di tengah kota Roma, Ibu Kota Italia. Boleh dibilang, Vatican adalah negara di dalam negara kalau yang kita jadikan alat ukur adalah peta geografisnya. Namun negara ini berdaulat dengan pemerintahannya sendiri yang saat ini dikepalai Paus Fransiskus.

Luas negara ini hanya 44 hektar, dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki luas 325.000 hektar dengan jumlah penduduk tak sampai 1.000 jiwa. Maka negara ini dari segi kekuatan fisiknya, terkesan sangat mudah ditaklukkan musuh. Apalagi negara ini tidak punya angkatan bersenjata layaknya TNI. Tapi herannya, tak ada satu negara pun di dunia ini yang coba-coba mencari perkara permusuhan dengannya. Sebaliknya, hampir se-

mua pimpinan di dunia merasa perlu menjalin hubungan diplomatik dengannya.

Para pemimpin dunia umumnya sadar bahwa sekalipun kecil, Vatican memiliki peran kunci dalam mengatur jalannya sejarah peradaban dunia. Hal ini tidak semata-mata karena Vatican memiliki total populasi 1,44 miliar di seluruh dunia menurut sensus 2023 sementara total populasi manusia di seluruh dunia adalah 7,22 miliar pada 2022. Anggap saja saat ini populasi dunia adalah 8 miliar sedangkan dari 8 miliar tersebut ada 1,44 miliarnya merupakan penganut Katolik. Itu artinya nyaris 1/7 penduduk dunia milik Vatican. Jumlah ini kalau ditambah lagi dengan umat Kristen lainnya yang non Katolik, maka bisa dipastikan nyaris 2/3 penduduk dunia. Ini jelas merupakan sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng lagi.

Lebih daripada itu, peran kunci Vatican terutama terletak pada kekuatan moral dan spiritualnya. Negara ini adalah satu dari sedikit negara di dunia yang mengambil teokrasi sebagai cara bernegaranya. Sebagai negara agama (teokrasi), Vatican menjadikan nilai-nilai yang dibawa Yesus Kristus sebagai sumber sekaligus tujuan bernegaranya. Karenanya Vatican tampil sebagai negara yang mempromosikan *theological virtue* (keutamaan ilahi) iman, harap dan kasih.

Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa Takhta Suci Vatican adalah negara yang memiliki misi keagamaan dan kemanusiaan di mana di dalamnya tentu mencakup penghormatan akan hak azasi manusia, gerakan ekumenis dan dialog dengan agama-agama lain, perdamaian dan kesejahteraan dunia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan (kristiani).

Kemenag Ketemu Jodoh

Dari untaian pemaparan di atas kita temukan fakta bahwa apa yang kini digencarkannya oleh Kemenag sesungguhnya merupakan hembusan nafas Vatican. *It is the mission of the Vatican at all time*. Artinya, *iku misi Vatican sak lawase!*

Sebab moderasi beragama adalah ikhtiar tentang sikap beragama seseorang yang tidak berlebihan di hadapan sesamanya yang berkeyakinan lain di satu sisi; dan peningkatan keberimanan bagi dirinya pada sisi lainnya, maka sejatinya itu adalah misi Vatican. Kalau sudah begitu faktanya, tidakkah itu berarti antara Vatican dan Kemenag sesungguhnya memiliki kesamaan misi? Kalau sama misinya, tidakkah itu berarti berjodoh?

Implikasinya pun jelas. momen kedatangan Sri Paus di tanah air boleh diterima sebagai momen pernikahan antara Vatican dan Kemenag. Tentu saja Sri Paus akan kembali ke negara yang dipimpinnya kelak dengan tetap menyandang status sebagai jomblo seumur hidup, sebab yang menikah yang kami maksudkan di sini adalah gagasan. Pernikahan gagasan menuju implementasi moderasi beragama, bukan antarorangnya. □d

Aven Jaman, *Pegawai Bimas Katolik Kanwil Kemenag DIY.*

Pojok KR

Paus Fransiskus memberikan pesan peneguhan kerukunan sesama umat beragama untuk kemanusiaan.
-- Pilkada juga rukun.

Waktu pendaftaran CPNS diperpanjang sampai dengan 10 September 2024.
-- Masih ada waktu.

Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat kewaspadaan penularan cacar monyet.
-- Virus monyet?

